

STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA BARU (STUDI KASUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)

Yaya Mulyana^{1*}, Ridho Harta²⁾, Bambang Agus Diana³⁾, Yayan Andri⁴⁾

¹Universitas Pasundan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
yaya.mulyana@unpas.ac.id

²Universitas Terbuka Indonesia, Jakarta, Indonesia
rdho@ecampus.ut.ac.id

³Universitas Terbuka Indonesia, Jakarta, Indonesia
bambangad@ecampus.ut.ac.id

⁴Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
yayanandri26@gmail.com

ABSTRAK

Berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Baru menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah. Tujuan lain dari penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah, berupa strategi kebijakan dengan model kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan Swasta atau dengan masyarakat dalam menata dan mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru. Hasil Penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studi kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara). Kolaborasi yang berlangsung antar *stakeholders* terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1). Face to face dialogue, 2). Trust Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Adapun temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif, yang akan memperkuat indikator Proses kolaborasi selain , 1). Face to face dialogue, 2). Trust Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan (Kolaborasi).

ABSTRACT

In connection with the plan to relocate the New Capital City, it has attracted the enthusiasm of both the Provincial and local governments to continue to intensively carry out infrastructure development as supporting infrastructure for the New Capital City. Infrastructure development is of course a joint responsibility of the Central, Provincial and Regional Governments. Another goal of this research is to be able to solve problems, in the form of a policy strategy with a model of collaboration between the government and the government, as well as between the government and the private sector or with the community in managing and preparing infrastructure to support the development of the New Capital City. The research results can be concluded that the New Capital Infrastructure Structuring Policy Strategy (Case Study in North Penajam Paser Regency). The collaboration that took place between stakeholders related to the Head of Authority, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Provincial Government. East Kalimantan, District Government. PPU, BUMD, Academics, Communities, Traditional leaders and the community, have been running well even though it is not optimal based on the Collaboration process put forward by Ansell and Grash, including, 1). Face to face dialogue, 2). Then Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. The findings of a new concept in this research are participatory supervision, which will strengthen the collaboration process indicators besides, 1). Face to face dialogue, 2). Trust Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes.

Keywords: Policy Strategy (Collaboration).



PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 April 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara dalam rapat terbatas dengan para menteri di kantor presiden. Alasan dari pemindahan ibu kota karena kondisi Jakarta dinilai tidak lagi memungkinkan untuk beberapa tahun kedepan. Jokowi menyebutkan, DKI Jakarta saat ini memikul dua beban berat, yakni sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta pusat bisnis. Ia mempertanyakan kemampuan kota ini di masa depan untuk memikul beban tersebut. Jokowi juga menceritakan bahwa sebenarnya wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak Presiden Sukarno menjadi kepala negara. Bahkan, dalam setiap kepemimpinan yang baru selalu dibahas, namun tidak pernah diputuskan dan direncanakan dengan matang. Pemindahan ibu kota memerlukan persiapan yang matang dan detail, termasuk dari sisi pemilihan lokasi dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, hingga kesiapan infrastruktur pendukung hingga pembiayaan, menjadi pusat perhatian saat ini adalah terkait kesiapan penataan infrastruktur (Jalan, Pembebasan Lahan, Jalan Tol) baik wilayah yang menjadi tempat pemindahan ibu kota baru maupun wilayah ibu kota sebelumnya yang akan terjadi suatu pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan. Infrastruktur merupakan salah satu pemegang peran penting dalam kehidupan, terutama infrastruktur jalan selain sebagai sarana dan prasarana transportasi juga merupakan aspek pendukung dalam pendistribusian barang maupun pendukung lainnya. Kemudian Infrastruktur akan mempengaruhi peningkatan produktivitas pada sektor produksi suatu daerah terutama Kabupaten Penajam Paser Utara yang di pilih sebagai wilayah calon Ibu Kota Baru. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan yang memahamkan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan agar tercipta kesejahteraan bagi umum.

Kalimantan Timur tepatnya di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 16 Agustus 2019 telah dipilih menjadi lokasi atas rencana pemindahan Ibu Kota Baru. Urgensi pemerintah dalam wacana tersebut ialah untuk mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata, terlihat dari konsentrasi pemerintahan serta kegiatan perekonomian yang masih terpusat di Kota Jakarta dan juga Jawa. Selain resiko bencana yang minim, ketersediaan lahan yang dimiliki oleh negara juga menjadi alasan Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih dengan letak geografis yang strategis. Berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Baru tersebut telah menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun daerah. Dalam hal ini membutuhkan suatu kerjasama yang kolaboratif dalam mempersiapkan Infrastruktur sebagai Strategi dalam penataan Infrastruktur ibu Kota Baru.

Penelitian ini berpusat pada Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru yang mana dalam implementasinya sudah tentu Peran Pemerintah dalam bekerjasama secara kolaboratif dari pemerintah pusat sampai daerah terutama dalam tahap awal terkait mempersiapkan Infrastruktur baik Jalan, Pembebasan Lahan, maupun jalan Tol sebagai akses untuk melakukan kegiatan dalam mendukung berjalannya pembangunan Ibu Kota Baru Di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut seiring dengan pendapat masyarakat dimana meminta agar Perbaikan Infrastruktur Khususnya lebih memfokuskan pada pembangunan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan pendukung akses dalam menyangga Ibu Kota Baru yaitu pada pembangunan jalan, mengingat bahwasannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023) menggambarkan kondisi jalan yang rusak berat yaitu 32,15 km pada ruas jalan Semoi, kemudian pada ruas jalan Sepaku- Petung (Penajam) sepanjang 48,72 km.

Tabel 1. Data Kondisi Jalan

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Kondisi				
		Baik/ km	Ringan / km	Sedang / km	Berat / Km	Ruas / km
1	KM 38-Semoi-Sepaku	7,38	8,52	20,75	2,88	39,52
2	Sepaku-Petung (Penajam)	15,71	10,75	26,06	11,97	64,48

Sumber: Data diolah oleh Dinas PUPR Kab. PPU

Sarana jalan sebagai pendukung dinamika serta aktivitas dari berbagai aspek dan juga sektor terutama menunjang dalam pembangunan Ibu Kota Baru dimana Data Menunjukkan terdapat beberapa luas jalan yang masih belum maksimal baik untuk mendukung Perekonomian warga setempat maupun mendukung dalam pembangunan Ibu kota Baru. Pembangunan infrastruktur jalan memiliki tujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 3 ayat (4) bahwa “Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.” Kondisi jalan yang rusak memiliki dampak pada kegiatan masyarakat seperti menghambat dalam proses menempuh pendidikan, menjadi faktor kendala dalam akses kesehatan, serta dapat menurunkan tingkat pendapatan pada sektor pertanian. Begitupun kondisi jalan akan berdampak besar dalam mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.



Gambar 1. Kondisi Jalan Utama Semoi II

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Mengingat bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pada sektor pertanian, peternakan, juga kehutanan berdasarkan potensi tersebut kelayakan atas sarana dan prasarana perlu di tingkatkan agar dapat memberikan dampak baik pada pendapatan perkapita daerah yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin. Begitupun berdampak serta mempermudah akses dalam melakukan pembangunan Ibu Kota Baru. Dimana Keberhasilan dalam mempersiapkan Infrastruktur tersebut tentu tidak terlepas dari andil adanya Kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan swasta dalam mengeluarkan kebijakan sebagaimana sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, serta tergantung pada bagaimana proses dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan dalam rangka penataan mempersiapkan infrastruktur awal untuk ibu kota baru (Jalan, Pembebasan Lahan, Jalan Tol) sebagai prasarana transportasi dasar



terdapat berbagai pertimbangan, tantangan yang akan dihadapi pada saat penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Baru tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Adanya Standar Minimum (SPM) yang merupakan ukuran terhadap kinerja dalam menyelenggarakan Infrastruktur jalan yang harus dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- b) Kemudian kelayakan fungsi jalan harus dapat terpenuhi tentu menjadi syarat yang utama sehingga jalan dapat melayani masyarakat pengguna jalan dengan aman dan nyaman apalagi akan di jadikan sebagai pendukung dalam pembangunan ibu kota baru, yang otomatis kendaraan besar dan lebar tentunya akan masuk kewilayah penajam paser utara.
- c) Aspek keselamatan merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian lebih sehingga kuantitas kejadian kecelakaan dan fatalitas dapat diminimalisir. Karena akan terjadi proyek besar-besaran dalam pembangunan Ibu Kota ini.
- d) Pembebasan lahan tentunya harus dilakukan secara Bijak sehingga tidak menuai kontroversi.
- e) Menyiapkan Infrastruktur Untuk Ibu Kota Baru tentunya harus memperhatikan Lingkungan.
- f) Serta perlu memperhatikan aspek keserasian dengan lingkungan sekitar warga sebagai warga Loka sehingga tidak merugikan warga lokal yang akan di gunakan sebagai Wilayah Ibu Kota Baru.

Pemerintah Pusat termasuk kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, BUMN, BUMD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara serta seluruh SKPD terkait dan stakholder lainnya yang terlibat dalam penataan infrastruktur ibu kota baru ini. dengan tugas pokok fungsi sebagai penyelenggara rencana strategis juga kebijakan telah berupaya memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi apa yang tengah di butuhkan oleh masyarakat dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No 1 Th 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PPU telah menyusun beberapa program sesuai dengan Misi yaitu meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan dengan arah kebijakan antara lain: Terwujudnya Infrastruktur berwawasan lingkungan, Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW, Serta membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana yang tentunya hal tersebut di selaraskan dengan rencana strategis pemerintah pusat dalam penataan infastruktur di penajam paser utara.

Begitupun akses yang menjadi perhatian dalam memindahkan ibu Kota Negara terkhusus dari jakarta yang terlihat begitu padat dan di khawatirkan pada saat melakukan pengangkutan berbagai fasilitas baik berupa alat berat ataupun penunjang lainnya dari Ibu Kota Lama ke Ibu Kota Baru di khawatirkan akan mengganggu ketertiban Umum seperti hal Macet dan lain sebagainya. dan tentunya Infrastruktur yang telah ada di ibu Kota Lama baik bekas Kementerian, serta perkantoran lainnya di jakarta bagaimana nasibnya setelah di tinggalkan atau pindah ke Penajam Paser Utara, jangan sampai meninggalkan infrastruktur yang telah ada menjadi mubah dan salah di pergunakan. Dalam Penataan Infrastruktur terkhusus untuk menyangga Ibu Kota Baru tentunya dalam kontek ini perlu adanya kolaborasi yang terpadu. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, BUMN, BUMD, Stakholder Terkait Baik Pihak Swasta, Akademisi, Pegiat Lingkungan dll. Oleh karena itu peneliti perlu mendalami proses kolaborasi yang di lakukan dari tatanan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pihak Keamanan, pihak swasta, tokoh masyarakat, akademisi, pegiat lingkungan terutama

dalam aspek Komitmen antara pihak yang berkolaborasi Dalam mewujudkan Penataan Infrastruktur tahap awal (Jalan, Pembebasan Lahan).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Menurut Moleong (2009:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati”. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat di peroleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah peneliti secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam study ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu hubungan Pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan Swasta dan masyarakat lebih jauh Sukidin (2003:1) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya”. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

Data hasil penelitian diperoleh langsung dari lapangan, melalui: (1). Wawancara, yaitu unstructured interview (wawancara tidak terstruktur) dan semistructured interviews (wawancara semi terstruktur). Wawancara tidak terstruktur dilakukan dalam kesempatan-kesempatan tertentu secara spontan. Sedangkan dalam wawancara semi terstruktur, peneliti telah membuat pedoman wawancara. Namun, pertanyaan berkembang dari pedoman. (2). Observasi, di mana peneliti mengambil catatan lapangan terhadap perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi sebagai non participant. Data Sekunder adalah berupa informasi yang tidak diperoleh dari lapangan langsung, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain yang mempunyai kontekstualitas yang sama, yang diperoleh melalui : (1). Studi dokumentasi. Creswell (2009:181) mengemukakannya sebagai qualitative document yang terdiri dari public documents (yaitu seperti surat kabar, notulensi, dan laporan resmi) atau private documents (yaitu seperti buku harian, surat, e-mail). (2). Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan karya tulis yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai yang dapat mendukung penelitian atau mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai landasan teoritis.

Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti, memiliki kapasitas dan kompeten terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Teknik penentuan informan dimulai dengan melakukan observasi dan komunikasi untuk mengetahui pihak-pihak yang memenuhi kriteria menjadi informan. Strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Menurut (Effendy, 2011) Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Sedangkan menurut Chandler (Yaya Mulyana A A , 2019) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi atau organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Quinn (Yaya Mulyana A A , 2019) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan organisasi, antisipasi perubahan dalam lingkungan. Dari penjelasan di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun Oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam riset ini, peneliti berfokus pada proses penataan dalam mempersiapkan ibu kota baru yang sudah tentunya dalam implementasinya memerlukan kolaborasi yang konfrehensip dari semua stakholder terkait dalam penataan infrastruktur ibu kota baru. Guidance theory yang digunakan dalam riset ini adalah Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 Tahapan proses kolaborasi di antaranya sebagai berikut :

1) *Face to face dialogue*

All collaborative governance builds on face-to-face dialogue between stakcholders. As a consesnsus-oriented process. The “thick communication” allowed by direct dialogue is necessary for stakeholders to identify opportunities for mutual gain. However, face-to face dialogue is more than merely the medium of negotiation.

Indikator pertama kolaborasi dalam Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru adalah para pihak yang akan berkolaborasi melakukan pertemuan dan berdialog langsung mengenai permasalahan yang akan di selesaikan secara bersama-sama.

2) *Trust building*

Good collaborative leaders recognize that they must build trust among erstwhile opponents before stakeholders will risk manipulation. What be comes evident in the case studies is that building is a time-consuming. Process that requires a long-term comitment to achieving collaborative aoutcomes.

Indikator kedua adalah membangun rasa percaya antar stakeholder yang akan melakukan kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kementerian terkait, SKPD terkait, BUMN, BUMD, Pihak swasta, Akademisi, Pegiat Lingkungan, serta masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan Kepercayaan masing-masing anggota untuk aktif terlibat karena kesadaran diri mereka secara pribadi maupun kepercayaan lembaga.

3) *Commitment to the process*

Commitment is closely related, of course, to the original motivation to participate in collaborative governance. But stakeholders may wish to participate in order to make sure their perpective is not neglected or to secure legitimacy for their position or to fulfill a legal obligation, act. By contras, commitment to the procces means developing a belief that good faith bargaining for mutual gains is the best way to achieve desirable policy outcomes.

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kolaborasi. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses dari proses kolaborasi, meskipun



komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggung jawab tersebut dikembangkan. Begitupun komitmen yang di terapkan antar setekholder yang akan berkolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kementerian terkait, SKPD terkait, BUMN, BUMD, Pihak swasta, Akademisi, Pegiat Lingkungan, serta masyarakat Menjalin komitmen yang kuat samapai tujuan bersama optimal dalam kolaborasi.

4) *Shared understanding*

At some in the collaborative process, stakeholders must develop a shared understanding of what they can collectively achieve together.

Stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (Stakeholder) capai melalui berbagai kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah. Semua Setekholder kolaborasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kementerian terkait, SKPD terkait, BUMN, BUMD, Pihak swasta, Akademisi, Pegiat Lingkungan, serta masyarakat, memiliki visi dan misi yang sama yaitu tercapainya Penataan Infrastruktur Yang Oftimal.

5) *Intermediate outcomes*

Further results from the collaboration process are manifested in the form of outputs or tangible outputs. This is the result of a critical and essential process in developing momentum that can guide the success of a collaboration.

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru mencapai tujuan yang optimal.

Melalui tahapan-tahapan diatas yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi atau perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan. Teori mengenai proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash menjabarkan secara rinci setiap tahap yang harus dilakukan dengan jelas untuk setiap point tahap pun juga di jabarkan dengan jelas. Maka dengan demikian teori Ansell dan Gash (2007:550) di pilih peneliti sebagai teori dalam penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru.

PEMBAHASAN

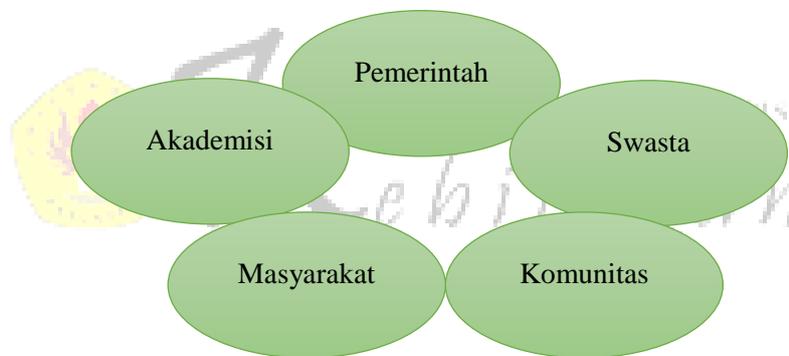
Pembangunan Infrstruktur kawasan IKN, tidak terlepas dari harapan dan cita-cita terhadap konsep yang menjadi acuan yaitu :

Kota Hutan (Forest City)

Pembangunan IKN diarahkan dengan meminimalkan kerusakan ekosistem alami, merestorasi ekosistem hutan, penyediaan koridor hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, pengelolaan Sumber Daya Air yang holistik, terintegrasi, dan menjaga kuantitas dan kualitas air, menerapkan pembangunan kawasan yang terkendali yang menjaga ekosistem dan kualitas lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian alam.

Kota Spons (Sponge City)

Konsep kota spons ini ditujukan untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan dengan cara membuka ruang terbuka hijau dan biru, desain fasilitas perkotaan yang ramah lingkungan, dan desain fasilitas perkotaan skala mikro (drainase, trotoar, bio-sengkedan, dan bioretensi) yang mendukung peningkatan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati. Kota Cerdas (Smart City), dalam konsep kota cerdas, pemerintah merancang adanya nilai tambah digital atau teknologi dalam pengembangan beberapa inisiatif cerdas yang diprioritaskan dalam IKN. Peluang digital ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dalam pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, dan siap menghadapi masa depan. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru sudah tentunya melibatkan Semua pihak stakeholders terkait, hal tersebut harus di sadari bahwa pihak tersebut harus berkolaborasi karena saling membutuhkan dan bergantung antara satu dan yang lainnya sebagaimana teori Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 Tahapan proses kolaborasi 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Bukan hanya formalitas untuk memenuhi laporan pada saat evaluasi keberhasilan program saja, bukan hanya menjadi milik pemegang tanggung jawab, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab dan komitmen dalam pembangunan Infrastruktur ini mengingat anggaran yang begitu gemuk dan merupakan Mega Proyek. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dalam proses pembangunan infrastruktur IKN, Maka kerjasama dan menjalin hubungan sesama aktor menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur Ibu kota Negara ini. Maka dalam proses kolaborasi penulis menggambarkan aktor-aktor stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Infrastruktur IKN sebagai berikut :



Gambar 2. Keterkaitan pihak dalam pembangunan Infrastruktur IKN
Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2022

Face to face dialogue

Agar Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur IKN, yang dilakukan bersama dapat optimal maka diperlukan sebuah proses yang akan mengatur alur dari kolaborasi tersebut. Dimana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 Bahwa pemerintah daerah khusus ibu kota negara nusantara adalah adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara. Hal tersebut terlihat tatkala peneliti kelapangan, yang mana berdasarkan pengakuan dari informan bahwa ;

“Persiapan pada tahap pertama adalah mengundang semua stakeholder terkait termasuk akademisi, komunitas, tokoh masyarakat serta pihak swasta untuk berkumpul bersama



bersama. Yang di pelori oleh kepala Otorita sebagai liding sektor. Dimana dalam persiapan pertama kita berkumpul mendengarkan arahan terkait Visi-Misi dan capaian yang hendak di capai dalam pembangunan Infrastruktur IKN ini, yang tentunya Tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara bersama stakholder terkait terutama Bapennas, PUPR, KLHK serta stakholder sampai bawah kecamatan, kelurahan melakukan berbagai konsolidasi terutama untuk melakukan suatu pendekatan yang logis dan masuk akal kepada Tokoh adat, masyarakat setempat di penajam paser utara terutama yang langsung terkena dampak salah satunya adalah Kecamatan Spaku”. (Hasil Wawancara, 14 September 2022)

Hal yang di kemukakan informan Tim Otorita dan PUPR sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Informan Camat Sepaku, bahwa :

“sebelum terlibat dalam berkolaborasi dengan pihak yang lain terlebih kami sebagai aparat yang ada di daerah yang langsung berhadapan dengan warga, tokoh berusaha memberikan pemahaman yang bisa di tangkap oleh semua warga terutama di kecamatan saya kecamatan sepakau. Saya di setiap ada pertemuan dengan wakga selalu membirikan pencerahan terkait IKN ini, bahwa sebelum di sahkan Undang-Undang IKN juga kami dari kecamatan terus memberikan pemikiran bahwa kita ini sudah di pilih akan mencadi Ibu Kota Negara, wargapun hampir mayoritas menerima dengan kata lain ada permintaan-permintaan atau ada masukan yang harus di persiapan sebelum Ikn pindah ke Penajam Paser Utara. Di antaranya mempersiapkan Sumber Daya Manusia Baik Formal maupun non formal untuk meningkatkan kafasitas dan kapabilitas warga lokal supaya siap menjadi tuan rumah yang terampil”. (hasil wawancara, 15 September 2022).

Begitupun Pihak Swasta, sebagai salah satu lembaga Swasta yang bersinergi serius terhadap pembangunan IKN. Sebagaimana pendapat yang di kemukakan oleh pihak Swasta dalam Pembagian ganti Rugi Lahan yang di gunakan bendungan bahwa:

“Sebelum terjadinya suatu kolaborasi dalam pertemuan langsung dalam pembangunan Infrastruktur IKN, dalam pembebasan lahan di kecamatan spaku pihak ketiga atau swasta bersinergi untuk segera merampungkan pembebsan lahan yang di gunakan untuk bendungan di Smoi Kecamatan Spaku”. (hasil wawancara, 16 September 2022).

Persiapan pada tahap awal selain persiapan internal atau individu-individu baik Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, Pihak Swasta, Akademisi memahami Visi dan Misi organisasi serta tujuan organisasinya namun juga mengenai keterbatasan organisasi dan kolaborasi yang akan dilakukan sebagai upaya atau metode yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala terkait keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan di adakannya suatu pertemuan langsung berbagai pihak yang akan berkolaborasi lebih mendekatkan kita mengetahui berbagai karakter latar belakang stekholder dalam bekerjasama. Sehingga pemahaman berbagai pihak terkait kolaborasi mereka tidak hanya sebatas memahami visi dan misi organisasi, serta tujuan yang khendak di capai serta yang harus di pahami yang lebih utama adalah keterbatasan masing-masing organisasi serta mengetahui mengapa pihak-pihak tersebut harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan serta hasil yang mereka tuju. Sehingga berbagai pihak mengetahuinya bahwa individu-individu tersebut sudah dapat berkomitmen untuk mendukung dan berkontribusi yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pihak-pihak terkait kolaborasi.

Trust building



Pihak-pihak yang berkolaborasi, terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN Tim Otorita, Bapennas, PUPR, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kab. PPU, Akademisi, Pegiat Lingkungan, Tokoh Masyarakat serta masyarakat. Bersama-sama berusaha untuk memaksimalkan pembangunan Infrastruktur IKN sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Melalui mandat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, di bentuk Kepala Otorita, dan pelaksana pembangunan IKN PUPR. Yang mana dalam proses pelaksanaannya banyak melibatkan semua komponen untuk pembangunan Infrastruktur IKN. Semua komponen memiliki tujuan yang sama yaitu Sesuai dengan Visi Ibu Kota Negara sebagai Kota Dunia (Kota Berkelanjutan di Dunia, Sebagai penggerak ekonomi indonesia dimasa depan, menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa indonesia, berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar RI tahun 1945). Dalam pembangunan Infrastruktur yang harus relevan dengan tujuan di atas maka tidak memungkinkan di atasi oleh pemerintah saja membutuhkan aspek-aspek di luar pemerintah maka dalam pembangunan infrastruktur IKN yang Visinya Jauh kedepan dan berkelas Dunia maka harus banyak melibatkan berbagai aspek Stakholder. Walaupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan tetapi tetap fokus serta mengikuti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, serta mengikuti sekema sistem Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagai dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu Kota Negara.

Suatu langkah dalam mencapai tujuan yang besar perlu menumbuhkan Sikap kepercayaan dalam kolaborasi adalah hal yang sangat penting dimana, sikap kepercayaan itu harus di bangun oleh semua Setekholder terkait dalam kolaborasi. yang dilakukan dengan adanya rapat atau pertemuan pada saat penyusunan Rencana Aksi. Walaupun sebageian pihak tidak di libatkan dalam Rencana Aksi, tetapi dalam pelaksanaan di butuhkan berbagai sumbangsih Baik dalam hal pemikiran atau yang lainnya, sehingga akan tumbuh rasa kepercayaan yang terbangun. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di katakan oleh pihak Kecamatan Sepaku dalam persiapan tahap awal ini:

“karna IKN ini program pusat, kami di daerah tidak bisa apa-apa namung saya sebagai camat selalu memberikan harapan yang fositip untuk warga saya. Dan kami pun tidak hanya membantu menjembatangani saja antara komunikasi pemerintah pusat dengan warga tetapi kami pun di daerah sepakat dengan warga, tokoh adat semuanya dalam pembangunan infrastruktur IKN ini harus meilbtkan warga serta IKN ini adalah Kepercayaan Pusat kepada kami, di sisi lain kami juga membuat komitmen peluncuran perbagai program untuk peningkatan kompetensi warga kami baik formal maupun nonformal. Hal ini terbukti warga kami sudah dan sedang berjalan di beri berbagai pelatihan baik dari pemerintah pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam hal ini kami bersinergi untuk mempersiapkan Sumber daya yang berkualitas dan siap bersaing tidak hanya menjadi penonton saja tatakala nanti sudah beroperasi IKN di Wilayah Kami ini”. (hasil wawancara, 15 September 2022).

Hal ini Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Tokoh warga di Kecamatan Sepaku mengatakan Bahwa :

“ Kami sebagai warga negara yang baik secara formilnya menerima IKN di wilayah kami, walaupun kami terusterang saja ada rasa kekwatiran sampai dengan saat ini, di antaranya kami khawatir termarginalkan atau terpinggirkan sebagai warga lokal oleh pendatang, kedua kekwatitan kami takutnya peran partisipasi warga lokal kami takut di perlemah juga, saya berharap sebagai tuan rumah tidak mau menjadi penonton saja tetapi harus ikut serta walaupun tidak sebagai pelopor karna kami pun merasa sangat kurang untuk kemampuan SDM kami di banding dengan SDM yang ada di luar Kalimantan”. (Hasil wawancara, 16 September 2022).



Commitment to the process

Kementeraian Terkait, Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov Kaltim, Pemerintah Kab PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat bersama-sama terlibat dalam pembangunan Infrastruktur IKN dengan komitmen yang tinggi untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Maka harus memiliki komitmen yang tinggi memacu pada pihak yang berkolaborasi Kementeraian Terkait, Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov Kaltim, Pemerintah Kab PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat untuk dapat mencapai prioritas atau tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana yang di inginkan. Hal ini di dukung oleh pendapat dari ATR/BPN, mengatakan bahwa :

“komitmen yang terlihat dilapangan melihat berbagai aspek stekholder baik pihak Pemerintah, swasta, pihak akademisi yang menyumbangkan banyak pemikiran beserta teknologi, begitupun pihak Komunitas Di lingkungan Penajam Paser Utara Khususnya Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku yang menandakan keseriusan serta komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama pada program Pembangunan IKN di setiap tahapannya, begitupun menteri ATR BPN akan merampungkan terkait pembebasan lahan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (Hasil wawancara, 14 September 2022).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Tokoh Warga Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengemukakan bahwa :

“Kami siap mengawal, Komitmen serta mendukung dalam pembangunan IKN dalam setiap tahapannya hal tersebut di kemukakan oleh Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku. serta pada rencana aksi yang telah di tetapkan. Bentuk komitmen serta keseriusan maka dari warga yang terhimpun dalam Forum siap berkolaborasi dalam pembangunan Infrastruktur dan pembangunan tahap-tahap berikutnya”. (hasil wawancara, 15 September 2022).

Shared understanding

Kolaborasi pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara, yang melibatkan berbagai stakholder berbagai Kementeraian Terkait, Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov Kaltim, Pemerintah Kab PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ada Kepala Otorita yang tupoksinyajelas dalam undang-undang tersebut tetapi hal tersebut tidak mungkin hanya di kerjakan oleh Kepala Otorita saja melainkan melibatkan banyak pihak yang harus ikut terlibat dalam upaya pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Namun yang sebenarnya pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang fokus dibidangnya atau tugas serta fungsi terkait dalam bidang pembangunan termasuk individu-individu di dalamnya. Selain melakukan penyusunan agenda atau kegiatan bersama yang akan di lakukan Kepala Otorita, Kementeraian Terkait, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat. Melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan posisi dan tukopsinya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di sampaikan Camat Sepaku menyatakan Bahwa :

“ Kami yang di daerah yang langsung berhadapan dengan warga yang paling krusial, maka saya di sini memposisikan diri sebagai penyambung komunikasi dari pusat, daerah ke warga saya. Yang mana luas wilayah kami ini dua kali lipat dari Ibu Kota DKI Jakarta dengan jumlah warga kami kurang lebih 38 Ribu penduduk. Saya selaku camat sebagai penyampai

informasi yang pasti valid saya sampaikan ke warga kami, berkaitan dengan apapun terutama berkaitan dengan persiapan SDM bagi warga kami, kami tersus bekerjasama dengan kementerian, dengan BLK-BLK se Indonesia supaya warga kami di ikut sertakan dalam hal pelatihan DLL. Hal tersebut merupakan langkah kami dalam rangka mempersiapkan sumber daya Manusia yang siap menjadi sumber daya Ibu Kota, yang mana kami harapkan warga kami kompeten dan SDM nya bisa menyesuaikan dengan SDM pendatang.”. (Hasil Wawancara, 15 September 2022).



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara

Sumber: Dokumen Pribadi, Tahun 2022

Intermediate outcomes

Further results from the collaboration process are manifested in the form of outputs or tangible outputs. This is the result of a critical and essential process in developing momentum that can guide the success of a collaboration. Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Hasil akhir dari kolaborasi pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara adalah mencapai tujuan yang optimal. Hal tersebut sejalan dengan apa yang peneliti temukan berkaitan dengan progres pembangunan Infrastruktur baik jalan, Jembatan, bendungan maupun infrastruktur lainnya sedang berjalan.



Gambar 4. Dokumentasi Jalan Utama Penajam Paser Utara yang sedang pelebaran dan Pengecoran.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Progres pengerjaan Infrastruktur ini sudah mau berjalan kurang lebih mendekati satu tahun maka yang paling di tekan kan bagaimana bentuk untuk memotivasi para partisipan adalah memberikan penghargaan terhadap keberhasilannya baik berupa materi maupun non-materil, serta berbagai pencapaiannya itu kepada orang lain agar orang lain ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Guna meningkatkan motivasi dan menunjukkan penghargaan atas segala upaya, jerih payah dan kontribusi yang diberikan semua stakholder yang bekerjasama Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat. Hal ini di harapkan mampu mamacu motivasi dan menjaga komitmen dari semua elemen yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. Hasil yang di capai merupakan salah satu bentuk untuk menunjukkan atas sejauh mana tujuan yang strategis tercapai. Menurut Ansell dan Gash tahap yang seharusnya dilakukan tidak hanya saat tahap akhir dari keseluruhan program telah dilakukan namun bisa dilakukan saat program atau pelaksanaan sedang berlangsung setelah evaluasi periodik dilakukan sehingga berdasarkan evaluasi periodik sebelumnya dapat diketahui sejauhmana pencapaian yang berhasil dilakukan sehingga dapat diberikan penghargaan atau apresiasi atas pencapaian tersebut. Begitu salah satu pihak mendapat penghargaan atau reward sebagai salah satu perayaan atau pencapaian yang dihasilkan memacu bagi pihak lain untuk lebih giat dan aktif melaksanakan tugasnya dalam kolaborasi pembangunan Ibu Kota Negara.

KESIMPULAN

Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studikasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara). Kolaborasi yang berlangsung antar stakeholders terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Sisilain dalam proses penataan infrastruk Ibu Kota Baru menunjukkan progres yang baik walaupun belum optimal dimana peran partisipasi masyarakat belum sepenuhnya di libatkan, Pengawasan belum maksimal di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di harapkan apalagi dalam pembangunan



Infrastruktur ini memakan anggaran besar, kekhawatiran warga yang terdampak masih belum lepas atas paradigma-paradigma seperti terpinggirkan atau termarginalkan oleh pendaatang walaupun persiapan dalam rangka meningkatkan mutu SDM terus di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun setempat. Adapun temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif, yang akan memperkuat indikator Proses kolaborasi selain , 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Husein MT, 2011. *“Manajemen Proyek; Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek”*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Adisasmita, Sakti Adji, 2011. *“ Perencanaan Pembangunan Transportasi”*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto dkk, 2003. *“Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah”* Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Alamsah, Kamal. 2005. *Administrasi Publik Dalam Persepektif Teori dan Praktek*. Unpas-Bandung : Ceplas
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2006. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia indonesia.
- Biemo W, Soemardi dan Reini D. Seminar *“Infrastruktur Untuk Semua”*, Kerjasama tiga Universitas: UI, UGM, ITB.
- Davis. Keith and Newstrom. John, M, 1996. *Human Behavior At Work*, Penerjemah Agus Dharma, Jakarta, Erlangga.
- Flippo B, Edwin. 1986. *Principle of Personel Management*. New York : Hill Book Campany Inc.
- Gibson, James L, John M Ivancevic, James H Donnely, Jr. 2007. *Organisasi, Perilaku-struktur-proses*), Edisi 8. Jilid 2. Terjemahan Nunuk Andriani Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Gordon. G. George & W.M. Cummins. 2003. *Managing Management Climate*. Lexington, Mass : Bina Rupa Aksara
- Gunarta, Kasima, 2012” *Infrastruktur Ekonomi”*. Jakarta: Penerbit Limas.
- Harith, Benyamin. 2005. *Teori Organisasi Jilid 1,2 dan 3*. Bandung : Insani Press
- Harith, Benyamin. 2006. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Governanc*. Bandung Universitas Pasundan.
- Hicks, Herbert & Ray Gullet. 1996. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*, terjemahan G Kartasaputra. Jakarta : Dunia Aksara
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam, 2009. *Perilaku Organisasi* : Sinar Baru.
- Kerlinger, Fred.N. 1998 *Azas-azas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Linden, Rusel. M. 2002. *Working Across Bounderies. Jossey Bass A Wiley Imprint*.
- Meleong, LJ, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjadja. 2009. *Kebijakan Administrasi Negara*. Jakarta : LAN-RI
- Nigro, Felix A. And Nigro, Lioyd G. 1977. *Modern Public Administrastion*. California : Harper and Row.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Prilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

- Robbins, Stephen P. 2013. Perilaku Organisasi. Terjemahan Muhamad, Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2007. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep Teori dan Dimensi, Jakarta : Sinar Baru Algensindo.
- Silalahi, Ulbert. 2007. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep Teori dan Dimensi, Jakarta : Sinar Baru Algensindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2009. Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP 3 ES.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
- Supriatna, Asep. 2011. Fungsi Administrasi Negara dan Sistem Administrasi Negara. Bandung : Panca Usaha.
- Suryadi, soleh. 2007. Administrasi Publik & Otonomi daerah, Bandung : Prisma Press.
- Thoha, Miftah. 2012. Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : CV Rajawali.
- Umar, Husein. 2013. Metode Riset Perilaku Individu Organisasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Wibowo. 2010. Budaya Organisasi : Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang. Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta : Rajawali Pers.
- Winardi, J. 2008. Motivasi Pemasukan Dalam Manajemen, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan Tol
- Lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
- Buku Saku Ibu Kota Negara

Sumber Media Massa

- <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota> (di Akses Pada bulan Desember 2021)
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/10571051/sidang-bersama-dpd-dpr-jokowi-minta-izin-pindah-ibu-kota-ke-kalimantan?page=all> (di akses Pada Bulan Januari 2022)
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210816122634-4-268757/2-tahun-luput-dari-pidato-jokowi-ri-jadi-pindah-ibu-kota> (di Akses Pada Bulan Maret 2022)
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU> (di akses Pada Bulan Agustus 2022)
- <https://www.youtube.com/watch?v=bZFiCtLZ1do> (di akses Bulan Agustus 2022)
- https://www.youtube.com/watch?v=ZVnpqS_60O8 (di akses pada Bulan Agustus 2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=PSiLsvryHkY> (diakses Pada Bulan September 2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=9SoYh2z9Y7c> (di akses Bulan September 2022)

